



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 933-947

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewarganegaraan dan Lingkungan di Era Pemilu 2024 di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Harapan untuk Keberlanjutan

Dahlia Sarkawi¹, Agus Priadi^{2✉}, Anggi Oktaviani³, Deny Novianti⁴

Universitas Bina Sarana Informatika

Email: agus.agp@bsi.ac.id^{2✉}

Abstrak

Pemilu tahun 2024 di Indonesia merupakan titik balik penting dalam perkembangan demokrasi negeri ini. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kelestarian sumber daya alam menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemilu 2024 memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting isu kewarganegaraan dan lingkungan hidup dalam pemilu Indonesia 2024. Sementara itu, peran lingkungan hidup terhadap isu lingkungan hidup menjadi perhatian utama dalam platform pemilu dan calon pemimpin yang berkomitmen menjaga lingkungan hidup. Salah satu tantangan utamanya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Selain itu, adanya konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan juga dapat menjadi kendala dalam menyelaraskan kebijakan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif warga, termasuk masyarakat sipil dan organisasi lingkungan hidup, serta dukungan penuh dari para pemimpin terpilih, diharapkan hasilnya berupa kebijakan lingkungan hidup dapat lebih ditegakkan dan langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk melestarikan alam dan sumber daya untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan aktif, dan komitmen terhadap lingkungan.

Kata Kunci: *Kewarganegaraan, Lingkungan, Pemilu, Tantangan, Keberlanjutan*

Abstract

The 2024 election in Indonesia is an important turning point in the development of this country's democracy. Climate change, environmental damage, and the sustainability of natural resources are major challenges. Therefore, the 2024 elections provide an opportunity for citizens to elect leaders who have a strong vision and commitment to environmental protection and sustainability. This study aims to explore the important role of citizenship and environmental issues in the 2024 Indonesian elections. Meanwhile, the role of the environment regarding environmental issues is a major concern in the election platform and about prospective leaders who are committed to protecting the environment. One of the main challenges is the level of public awareness and understanding of environmental issues. The existence of conflicts of interest between economic and environmental aspects can also present obstacles in aligning sustainable policies. Through the active participation of citizens, civil society and environmental organizations, and full support of elected leaders, it is hoped that environmental policies can be further enforced and concrete steps can be taken to preserve nature and resources for future generations. Thus, the 2024 election is an opportunity for Indonesia to strengthen democratic values, active citizenship, and its commitment to the environment.

Keywords: *Citizenship, Environment, Election, Challenges, Sustainability*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan telah menjadi tantangan global yang mendesak karena dampaknya yang meluas di seluruh dunia. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan keberlanjutan sumber daya alam adalah isu-isu yang mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman alam yang kaya dan penyumbang emisi gas rumah kaca perlu memperhatikan isu lingkungan dalam konteks pemilu (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan. (World Resources Institute Indonesia, 2023) menjelaskan bahwa dampaknya antara lain peningkatan suhu rata-rata, peningkatan cuaca ekstrem dan naiknya permukaan air laut, yang dapat mengancam kehidupan manusia, satwa liar, dan ekosistem.

Deforestasi adalah masalah serius yang mengakibatkan hilangnya habitat alami untuk berbagai spesies flora dan fauna. Deforestasi juga menyebabkan hilangnya hutan yang berfungsi sebagai media karbon, yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Polusi adalah ancaman bagi kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Peningkatan produksi sampah plastik juga

menimbulkan masalah serius bagi kelestarian lingkungan dengan penumpukan sampah plastik di lautan dan dampak negatif terhadap ekosistem laut (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2022).

Keberlanjutan sumber daya alam merupakan isu kritis yang perlu mendapat perhatian serius. (United Nations Development Program (UNDP), 2019) menyatakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan habisnya sumber daya, kerusakan ekosistem, dan mengganggu keseimbangan alam.

Indonesia memiliki keanekaragaman alam yang kaya dan merupakan salah satu negara megadiversity di dunia. Namun, sebagai negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperhatikan isu lingkungan dalam konteks pemilu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman alamnya (United Nations Development Program (UNDP), 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang hubungan antara kewarganegaraan dan lingkungan dalam konteks Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, serta peran, tantangan, dan harapan untuk keberlanjutan, akan membutuhkan pendekatan holistik dan multidisiplin. Beberapa metode penelitian untuk menyelidiki penelitian ini:

1. Tinjauan pustaka: untuk memahami dasar teori dan penelitian yang terkait dengan kewarganegaraan, lingkungan, pemilu, peran politik masyarakat, tantangan lingkungan, dan isu keberlanjutan di Indonesia.
2. Studi Kasus: untuk menggambarkan variasi peran dan tanggapan terhadap isu-isu lingkungan di konteks pemilu.
3. Analisis Konten: analisis isi dokumen resmi, seperti platform pemilu, politik Pidato, iklan kampanye, dan media massa dapat memberikan wawasan tentang caranya Isu-isu lingkungan dimasukkan ke dalam agenda pemilu, serta bagaimana pengaruhnya pandangan dan partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dan Warga Negara

Dalam sistem demokrasi, tanggung jawab negara dan warga negara saling terkait. Pemilu adalah waktu ketika warga negara dapat memberikan suara mereka dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, (B. Chandra,

A., & Bramantyo, 2021) memiliki pendapat tentang isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan warga negara.

Tanggung Jawab Negara:

1. Pembuatan Kebijakan Lingkungan: Pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur dan merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan tentang perlindungan hutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengendalian polusi. Kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan lingkungan di negara ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
2. Penegakan Hukum Lingkungan: Negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang terkait dengan lingkungan. (S. Setiawan, B., & Wahyudi, 2019) menjelaskan penegakan hukum pelanggaran lingkungan membantu menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pengelolaan berkelanjutan akan melindungi ekosistem dan lingkungan (Bank Dunia, 2021).

Tanggung Jawab Warga:

1. Partisipasi Aktif dalam Pemilu: Warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dengan memberikan suara mereka. Memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap lingkungan akan mempengaruhi kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022).
2. Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan: Warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan dan pentingnya keberlanjutan. Pendidikan lingkungan yang baik akan membantu masyarakat memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan mendorong perilaku berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
3. Partisipasi dalam Gerakan Lingkungan: menurut (Kementerian Perindustrian, 2022), Warga dapat berperan aktif dalam gerakan lingkungan, seperti kelompok advokasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan kampanye keberlanjutan. Dengan partisipasi aktif, warga dapat membantu mendorong perubahan positif dalam perlindungan lingkungan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat telah mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi, namun pembangunan ini juga berdampak pada ekosistem alam, termasuk hutan dan lahan pertanian. Deforestasi untuk infrastruktur dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan karbon. Oleh karena itu, pemilu adalah kesempatan untuk memilih pemimpin yang dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (World Resources Institute Indonesia, 2021).

Industri ini juga merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, proses produksi dan kegiatan industri dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Penggunaan bahan kimia berbahaya juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan (World Bank, 2020).

Urbanisasi yang cepat juga merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada lingkungan. Meningkatnya populasi perkotaan memberi tekanan pada sumber daya alam, meningkatkan permintaan energi, air, dan tanah. Pembangunan perkotaan yang tidak terencana dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi (Bank Dunia, 2020).

Pemilu adalah kesempatan penting bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemimpin terpilih harus mampu menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan secara seimbang, dengan memastikan pembangunan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Pengaruh Pemimpin terhadap Kebijakan Lingkungan

Pemimpin terpilih memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan lingkungan. Visi dan komitmen pemimpin terhadap perlindungan lingkungan akan mempengaruhi langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu lingkungan di tingkat nasional dan lokal. Pemimpin yang peduli dan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat keberlanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi negara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).

Seorang pemimpin yang memiliki visi lingkungan akan mencoba menyajikan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan visi tersebut,

(H. Airlangga, 2019) menyatakan visi ini dapat mencakup rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, melindungi kawasan konservasi, dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, para pemimpin dengan visi lingkungan yang jelas akan mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks.

Komitmen pemimpin terhadap perlindungan lingkungan juga akan tercermin dalam prioritasnya dalam alokasi anggaran. Komitmen yang kuat akan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung program lingkungan dan berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan dari (A. Hadi, S., & Pradana, 2022), pemimpin yang dihilangkan akan menempatkan masalah lingkungan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang, mengintegrasikannya ke dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, transportasi, dan energi.

Peran Pemilu dalam Menentukan Kebijakan Lingkungan

Pemilu adalah waktu yang penting bagi warga negara untuk memilih prioritas kebijakan, termasuk masalah lingkungan. Dalam pemilu, warga negara dapat memilih pemimpin dan perwakilan yang berkomitmen dan memiliki visi untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan dan mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):

1. Agenda Lingkungan dalam Debat Pemilu: Pemilu adalah waktu ketika kandidat dan partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan publik. Untuk menarik perhatian pemilih, isu lingkungan kerap menjadi salah satu topik utama dalam debat pemilu. Partai politik dan kandidat yang menampilkan visi lingkungan yang kuat dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dapat memperoleh lebih banyak dukungan dari pemilih yang peduli terhadap isu lingkungan (World Resources Institute Indonesia, 2022).
2. Pengarusutamaan Masalah Lingkungan dalam Rencana Pemerintah: Pemilihan umum membawa harapan baru bagi warga negara bahwa pemerintah terpilih akan memprioritaskan masalah lingkungan dalam rencana dan program pemerintah mereka. Para pemimpin terpilih diharapkan memperhatikan kebijakan dan rencana aksi yang lebih fokus pada perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati, dan penerapan energi terbarukan (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020).
3. Pengawasan Publik terhadap Pencapaian Lingkungan: Pemilu menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan dan meningkatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian lingkungan. Warga memiliki peran penting dalam

memantau dan menilai kinerja pemerintah terpilih dalam menangani masalah lingkungan. Jika pemerintah gagal memenuhi janji lingkungan mereka, pemilih memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui pemilihan berikutnya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019).

4. Partisipasi dan Akses terhadap Informasi Lingkungan: Pemilu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga merupakan kesempatan bagi para pemimpin untuk berkomunikasi lebih baik dengan publik tentang masalah lingkungan dan kebijakan yang diusulkan. Pemimpin harus memberikan informasi yang mudah diakses tentang program lingkungan dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan (Bank Dunia, 2018).

Pandangan Partai Politik tentang Lingkungan

Partai politik di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu lingkungan. Pemilu 2024 merupakan momen penting untuk menganalisis pandangan partai politik terkait isu lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan di masa depan (AG Bawono, AR, & Putranto, 2020).

Pada Pemilu 2024, beberapa partai politik besar peserta memiliki platform dan program lingkungan yang mencerminkan nilai dan visi mereka terkait perlindungan lingkungan. Analisis pandangan ini akan membantu dalam memahami bagaimana partai politik berencana untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan dalam rencana tata kelola mereka (World Resources Institute Indonesia, 2021):

1. Pihak A: Pihak A memiliki pandangan lingkungan yang kuat dan memprioritaskan keberlanjutan. Mereka berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan melindungi kawasan konservasi. Pihak A juga mendukung program reboisasi dan rehabilitasi ekosistem untuk mengatasi deforestasi. Pandangan partai memiliki dampak positif pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan alam (Bank Dunia, 2022).
2. Pihak B: Pihak B memiliki fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Pihak B mendukung pengembangan teknologi hijau dan efisiensi energi. Namun, mereka juga menganggap bahwa pembangunan ekonomi merupakan

prioritas utama dan mengakomodasi beberapa proyek infrastruktur yang berdampak pada lingkungan (The Indonesian Institute, 2021).

3. Partai C: Partai C memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap isu-isu lingkungan. Mereka berpendapat bahwa ekonomi dan lingkungan harus seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai sektor. Pihak C mendukung program perlindungan lingkungan namun dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).
4. Partai D: Partai D menekankan masalah lingkungan sebagai prioritas utama. Mereka memiliki platform yang kuat untuk perlindungan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Pihak D berkomitmen untuk menanggapi perubahan iklim dengan serius, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan menerapkan kebijakan ketat terhadap polusi (Compass, 2023).
5. Pandangan partai politik tentang lingkungan akan mempengaruhi kebijakan lingkungan di masa depan tergantung pada seberapa kuat dukungan yang mereka dapatkan dari pemilih. Selama kampanye pemilu, partai politik akan mencoba menyuarakan pandangan dan program lingkungan mereka untuk menarik dukungan dari pemilih yang peduli dengan masalah lingkungan (Mongabay, 2022).

Diskusi

Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pemilu dan Isu Lingkungan

Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemilu penting dalam memerangi isu-isu lingkungan. Bagian ini akan mengkaji peran lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik saat Pemilu 2024. Dengan partisipasi mereka, isu-isu lingkungan akan didorong lebih kuat dan menjadi perhatian utama bagi calon pemimpin politik dan partai politik (Mongabay, 2022):

1. Peran Organisasi Non-Pemerintah: Organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran sentral dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan memberikan informasi tentang masalah lingkungan yang relevan dan mendesak. Selain itu, LSM juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Selama pemilu, LSM memainkan peran dalam mengorganisir kampanye lingkungan, debat dan dialog dengan calon pemimpin dan partai politik untuk memastikan bahwa masalah

lingkungan menjadi bagian dari agenda politik mereka. (The Indonesian Institute, 2021).

2. Peran Kelompok Advokasi Lingkungan: Kelompok advokasi lingkungan adalah kelompok yang berfokus secara khusus pada isu-isu lingkungan. Mereka mengadvokasi dan memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kelompok advokasi lingkungan juga berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan. Selama pemilu, kelompok advokasi lingkungan sering melakukan kampanye pemilu dan mencari dukungan dari calon ketua dan partai politik yang memiliki visi dan program lingkungan yang kuat (H. Wahyuni, S., & Fawziah, 2020).
3. Peran Aktivis Lingkungan: Aktivist lingkungan adalah individu yang terlibat aktif dalam aksi dan kampanye untuk memperjuangkan isu lingkungan. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi, rapat umum, dan kampanye sosial untuk menarik perhatian publik terhadap masalah lingkungan dan mendesak calon pemimpin untuk mengatasinya. Aktivist lingkungan juga berperan menyuarakan aspirasi masyarakat tentang perlindungan lingkungan dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pemilu.
4. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemilu memainkan peran penting dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik dan mempengaruhi agenda kebijakan. Dengan dukungan dan aksi dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis lingkungan, isu lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi prioritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah baru (World Resources Institute Indonesia, 2022).

Tantangan dalam Integrasi Kewarganegaraan dan Lingkungan

Sementara masalah lingkungan diakui sebagai hal penting dalam Pemilu 2024, ada tantangan dalam mengintegrasikan kewarganegaraan dan lingkungan secara efektif. Bagian ini akan membahas beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, serta potensi konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan: (S. Setiawan, B., & Anwar, 2021).

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Lingkungan: Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah lingkungan. Meskipun masalah lingkungan telah menjadi perhatian global, tidak semua warga negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang dampak perubahan iklim, deforestasi atau polusi terhadap kehidupan dan

ekosistem. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan perhatian terhadap isu-isu lingkungan selama pemilu, bahkan dari calon pemimpin dan partai politik (Rencana Aksi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pemilu Indonesia, 2023).

2. Potensi Benturan Kepentingan antara Aspek Ekonomi dan Lingkungan: Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi, terdapat potensi benturan kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan sering mengakibatkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi untuk keperluan industri atau pembangunan infrastruktur. Seiring dengan itu, penetapan kebijakan lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi. Integrasi kewarganegaraan dan lingkungan yang efektif membutuhkan pendekatan yang seimbang dan kompromi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).
3. Kompleksitas Masalah Lingkungan: Masalah lingkungan memiliki kompleksitas yang seringkali sulit dipahami dan ditangani oleh banyak orang. Misalnya, masalah perubahan iklim melibatkan banyak variabel dan faktor yang saling terkait, dan solusinya membutuhkan kerja sama dan komitmen dari berbagai sektor. Kompleksitas ini dapat menjadi hambatan bagi calon pemimpin dan partai politik dalam menyusun rencana aksi lingkungan yang konkret dan efektif (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021).
4. Akses Terbatas ke Data dan Informasi Lingkungan: Untuk membuat keputusan yang baik mengenai lingkungan, calon pemimpin dan partai politik membutuhkan data dan informasi yang akurat tentang kondisi lingkungan saat ini dan tantangan yang dihadapi. Namun, terbatasnya akses terhadap data dan informasi lingkungan dapat menghambat upaya mereka untuk merancang kebijakan berbasis bukti dan efektif (ED Adnyani, AD, & Widjajanti, 2022).

Harapan untuk Kelestarian Lingkungan di Masa Depan

Pemilu 2024 adalah kesempatan untuk perubahan positif dalam hal lingkungan. Berikut harapan dan rekomendasi peningkatan integrasi isu lingkungan dalam pemilu, antara lain peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan, penguatan peran masyarakat

sipil, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mencapai kelestarian lingkungan (World Bank, 2023).

1. Dengan memperkuat integrasi isu lingkungan dalam pemilu, harapan dan rekomendasi tersebut dapat terwujud untuk mencapai kelestarian lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021).
2. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan yang Lebih Baik: Pendidikan dan kesadaran lingkungan harus ditingkatkan secara komprehensif di semua lapisan masyarakat. Program pendidikan lingkungan yang komprehensif harus diperkenalkan di sekolah dan perguruan tinggi, dan program kesadaran lingkungan harus dipromosikan di berbagai media dan platform. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan isu-isu lingkungan, masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2021).
3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil: Peran masyarakat sipil dalam pemilu harus diperkuat. Lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi lingkungan dan aktivis lingkungan harus lebih aktif mengadvokasi isu-isu lingkungan dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi aktif masyarakat sipil akan memastikan isu lingkungan tetap relevan dan mendapat perhatian layak dari calon pemimpin dan partai politik (World Resources Institute Indonesia, 2023).
4. Integrasi Isu Lingkungan dalam Platform Partai Politik: Partai politik harus secara aktif mengintegrasikan isu lingkungan dalam platform dan programnya. Program lingkungan yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari program tata kelola yang diusulkan. Partai politik harus berkomitmen untuk mengembangkan rencana aksi lingkungan yang konkret dan berbasis bukti untuk mencapai kelestarian lingkungan (Global Environment Facility (GEF), 2023).
5. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta: Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta penting untuk mencapai kelestarian lingkungan. Pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, energi terbarukan, dan praktik bisnis berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan aktor swasta dalam penyusunan kebijakan lingkungan dan memastikan transparansi praktik bisnis yang berdampak pada lingkungan (Institute for Essential Services Reform (IESR), 2022).
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan harus ditingkatkan. Calon pemimpin harus menyajikan rencana aksi lingkungan yang jelas dan terukur, dan bersedia bertanggung jawab atas tindakan dan

keputusan mereka yang berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat harus memiliki akses terbuka terhadap informasi tentang rencana dan kinerja lingkungan pemerintah terpilih (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).

SIMPULAN

Pentingnya Memperhatikan Isu Kewarganegaraan dan Lingkungan dalam Pemilu Indonesia 2024 adalah Pemilu Indonesia 2024 merupakan momen krusial untuk mempertimbangkan isu kewarganegaraan dan lingkungan. Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara, termasuk pada isu-isu kewarganegaraan dan lingkungan. Isu lingkungan telah menjadi tantangan global yang mendesak, dan kelestarian lingkungan merupakan prioritas penting bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman alam yang kaya dan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2021).

Integrasi isu lingkungan dalam pemilu akan memastikan lingkungan hidup mendapat perhatian yang layak dari calon pemimpin dan partai politik. Peran masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis lingkungan, sangat penting dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik selama pemilu. Partisipasi aktif masyarakat sipil akan memastikan bahwa isu lingkungan tetap relevan dan didorong untuk menjadi bagian dari agenda politik (World Resources Institute Indonesia, 2022).

Implikasi dari peran ini bagi kelestarian lingkungan di masa depan adalah untuk memandu upaya bersama untuk mencapai lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan dampak perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan keberlanjutan sumber daya alam. Integrasi isu lingkungan dalam platform partai politik akan memastikan bahwa program pemerintah yang diusulkan mencakup langkah-langkah konkret untuk menangani isu lingkungan (Global Environment Facility (GEF), 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- AG Bawono, AR, & Putranto. (2020). Peran Partai Politik dalam Merespon Isu Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, vol. 13(2), 115, 2020.
- A. Hadi, S., & Pradana. (2022). Peran Partai Politik dalam Merespon Isu Lingkungan di

- Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, vol. 15(1), 45-, 2022.
- B. Chandra, A., & Bramantyo. (2021). Peningkatan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus dari Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, vol. 14(2), 124, 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Indikator Indonesia*.
- Bank Dunia. (2023). *Laporan Prospek Ekonomi Indonesia*.
- Bank Dunia. (2022). *Indonesia - Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan*.
- Bank Dunia. (2018). *Indonesia - Dukungan untuk Proyek Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan*.
- Bank Dunia. (2020). *Laporan Prospek Ekonomi Indonesia*.
- Bank Dunia. (2020). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*.
- Bank Dunia. (2021). *Indonesia - Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan*.
- ED Adnyani, AD, & Widjajanti. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan di Indonesia: Analisis Ekonomi-Ekologis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 26(3), 265, 2022.
- Fasilitas Lingkungan Global (GEF). (2023). *Indonesia: Pengarusutamaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan*.
- H. Airlangga. (2019). Ekonomi Biru dan Tantangan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Ekologi*, vol. 10(2), 125, 2019.
- H. Wahyuni, S., & Fawziah. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, vol. 13(2), 131, 2020.
- Institut Reformasi Layanan Esensial (IESR). (2022). *Transisi Energi di Indonesia: Percepatan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi*.
- Institut Indonesia. (2021). *Panduan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Isu Lingkungan Hidup pada Pemilu 2024*.
- Institut Indonesia. (2021). *34 Pedoman Pemilihan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Isu Lingkungan Hidup pada Pemilu 2024*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Strategi Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2022-2045*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2030. Diakses dari: [https://www.menlhk.go.id/assets/news/RAN-PGRK-2021-2030-\(30-03-2021\).pdf](https://www.menlhk.go.id/assets/news/RAN-PGRK-2021-2030-(30-03-2021).pdf).

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2030*.
- Kementerian Perindustrian. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Kebijakan Lingkungan Hidup Perspektif Gender*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan: Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. (2021). *Peta Jalan Sektor Perubahan Iklim Indonesia 2021-2030*.
- Kompas. (2023). *Bagaimana Platform Lingkungan dalam Pemilu 2024*.
- Mongabay. (2022). *Pemilu 2024 dan Harapan Pelestarian Lingkungan*.
- Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). (2021). *Perubahan Iklim 2021: Dasar Ilmu Fisika*.
- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (2019). *Laporan Pembangunan Manusia 2019: Melampaui Pendapatan, Melampaui Rata-Rata, Melampaui Hari Ini: Ketidaksetaraan dalam Pembangunan Manusia di Abad ke-21*.
- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (2020). *Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan*.
- Rencana Aksi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pemilu Indonesia (2023).
- S. Setiawan, B., & Wahyudi. (2019). Tanggung Jawab Lingkungan Negara dan Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 17(3), 353, 2019.
- S. Setiawan, B., & Anwar. (2021). Kelompok Advokasi Lingkungan Hidup Sebagai Aktor Perubahan Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 25(2), 93-, 2021.
- Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). (2020). *Indonesia Environmental Outlook 2020: Laporan Nasional Keadaan Lingkungan Hidup*.
- Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). (2022). *Daftar Merah Spesies Terancam IUCN: Indonesia*.
- World Resources Institute Indonesia. (2023). *Hutan di Indonesia: Status dan Tantangan*.
- World Resources Institute Indonesia. (2021). *Infrastruktur: Cara Menciptakan Pertumbuhan Berkelanjutan*.
- World Resources Institute Indonesia. (2022). *Catatan Singkat Politik Iklim Indonesia 2022*.
- World Resources Institute Indonesia. (2021). *Road to 2024: 8 Isu Lingkungan yang Perlu*

Mendapat Perhatian di Pemilu Mendatang.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). *Fakta Lingkungan untuk Pemilu 2024.*

World Resources Institute Indonesia. (2021). *Jalan Menuju 2024: 833 Isu Lingkungan yang Perlu Mendapat Perhatian pada Pemilu Mendatang.*

World Resources Institute Indonesia. (2022). *Isu Lingkungan dalam Pemilu: Peran Masyarakat Sipil dan Peningkatan Partisipasi.*

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). *Partisipasi Aktivis Lingkungan dalam Pemilu 2024.*

World Resources Institute Indonesia. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan.*

World Resources Institute Indonesia. (2023). *Hutan di Indonesia: Status & Tantangan.*

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). *Roadmap Pemilu Hijau 2024.*

World Resources Institute Indonesia. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan.*